

TERIMA KUNJUNGAN PLN BATAM, OMBUDSMAN KEPRI DIMINTA LAKUKAN PENGAWASAN

Senin, 30 Agustus 2021 - Yemima Dwi Kurnia Wati

Batam - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja Direktur Utama PT PLN Batam, Nyoman S. Astawa dan jajarannya pada Jumat (27/8/2021). Dalam kunjungan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari berharap bahwa pergantian Direktur Utama baru PT PLN Batam dari Budi Pangestu kepada Nyoman S. Astawa dapat membawa perubahan bagi pelayanan listrik di Batam. Adapun Nyoman yang sebelumnya menjabat sebagai *General Manager* PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, pada awal Maret lalu ditunjuk memimpin PLN Batam mengatakan akan bertekad meningkatkan pelayanan. Ia berkomitmen agar PT PLN Batam sebagai pelayan masyarakat harus bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik sebab pelayanan terhadap konsumen menjadi kunci utama kinerja. Hal ini akan menjadi fokusnya agar semua pelayanan ditingkatkan dan dipertahankan. Peningkatan pelayanan juga dimaksudkan agar *Key Performance Indicator* (KPI) dalam realisasi penjualan listrik terus tercapai dan meningkat.

Untuk memastikan kinerja pelayanan publik berjalan dengan baik, PLN Batam meminta agar Ombudsman Perwakilan Kepri mengawasi kinerja dengan siap selalu diberikan catatan serta evaluasi demi perbaikan pelayanan yang dipandang masih bermasalah oleh masyarakat. PT PLN Batam akan terus mengembangkan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) agar ketersediaan energi listrik terus bisa maksimal. Program-program untuk konsumen juga akan ditingkatkan agar semua berjalan maksimal.

Nyoman mengatakan bahwa sejak tahun 2017 lalu PT PLN Batam berhasil mengembangkan wilayah bisnisnya ke Pulau Bintan dengan membangun jaringan kabel laut interkoneksi Batam-Bintan dengan suplai 75 MW. Kota Tangjungpinang yang bermasalah karena kekurangan daya listrik akhirnya selesai ketika interkoneksi diaktifkan. Kapasitas produksi daya dari sejumlah pembangkit yang dibangun adalah 520 MW, sedangkan pemakaian beban puncak sebesar 495 MW sehingga menyisakan 25 MW sebagai reserve margin atau setara 5%. Sampai tahun depan, PT PLN Batam memiliki rencana akan membangun dua pembangkit baru dengan kapasitas produksi sekitar 90 MW untuk mendukung pengembangan kawasan Batamindo dan KEK Nongsa. Dengan demikian proyeksi ketersediaan daya listrik di Batam dinilai akan aman sampai dua tahun ke depan.

Namun dalam penelusuran data dan informasi yang dilakukan Ombudsman RI, masih ada sejumlah masalah layanan listrik di Batam yang harus diselesaikan pihak manajemen PT PLN Batam, di antaranya :

Pertama, Pulau Batam yang dikelilingi laut sangat tinggi potensi terjadinya petir. Akibatnya, mesin pembangkit sering mendadak tersambar akibatnya beberapa kali nyaris seluruh wilayah Batam dan Bintan mengalami mendadak padam listrik. Harus ada upaya penggunaan teknologi canggih yang mampu mengatasi masalah ini.

Kedua, sistem kelistrikan di Batam dikelola khusus (bukan PLN Persero) sehingga pelanggan listrik di Batam dikecualikan menikmati program stimulus dari pemerintah bagi pelanggan rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga bisnis. Di saat daerah lain mendapatkannya tapi tidak bagi pelanggan PLN Batam. Direksi harus meminta kepada Menteri ESDM agar pelanggan di Batam juga mendapatkan stimulus yang sama dengan daerah lain.

Ketiga, adanya isu pungutan liar penyambungan baru yang dikeluhkan masyarakat. Direksi harus melakukan evaluasi dan menyusun ulang manajemen sistem pengawasan terhadap pegawai sehingga memutus potensi terjadinya pungutan liar pada masyarakat. Selanjutnya, adanya keluhan masyarakat atas pemutusan meteran pelanggan yang menunggak tagihan yang dilakukan kurang simpatik oleh petugas.

Kelima, belum rampungnya pembangunan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Batu Besar - Gardu Induk Nongsa karena konflik dengan masyarakat.

"Pada akhirnya Ombudsman RI berharap agar Direksi PT PLN Batam dan jajaran mampu mewujudkan pencapaian mimpi perusahaan dalam visinya menjadi penyedia listrik terbaik dan solusi terintegrasi di Asia Tenggara. Pulau Batam dan Bintan memiliki prospek yang sangat menjanjikan bagi pengembangan usaha jual listrik karena pengembangan industri dan bisnis dengan mengundang investor PMDN dan PMA dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam dan Bintan," jelas Lagat. "Dengan perkiraan pertambahan jumlah penduduk Batam sekitar 3% tiap tahunnya, maka kebutuhan listrik akan meningkat. Oleh karena itu PT PLN Batam harus mempersiapkan pengembangan plan bisnisnya membangun pembangkit-pembangkit baru menyesuaikan kebutuhan yang ada," tutupnya.